

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara agraris, dimana sektor pertanian memegang peranan yang sangat penting dari keseluruhan perekonomian nasional. Di Indonesia mayoritas penduduk hidup dari sektor pertanian, terdapat lebih dari 60% penduduk Indonesia yang berdomisili dipedesaan dengan pertanian sebagai mata pencaharian utama. Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk keempat tertinggi di dunia cukup wajar bila ketahanan pangan selalu menjadi fokus perhatian kebijakan pemerintah. Salah satu kebijakan pemerintah untuk ketahanan pangan adalah melalui program pembangunan pertanian dimana pemerintah memiliki target swasembada pangan pada tahun 2017 (Kementrian Pertanian,2015:131).

Dalam pembangunan pertanian di Sumatera Barat, sub sektor Pertanian Tanaman Pangan memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dibandingkan dengan sub sektor lainnya. Dari total PDRB Sumatera Barat tahun 2014 sebesar 22,41% disumbangkan oleh sektor pertanian dengan nilai nominal 32,4 triliun rupiah, kemudian 18,98 % disumbangkan oleh sektor perdagangan, hotel, dan restoran; 17,07 % disumbangkan oleh sektor pengangkutan dan komunikasi; 16,42% disumbangkan oleh sektor jasa-jasa; 10,35 % disumbangkan oleh sektor industri pengolahan dan 14,77 % disumbangkan oleh sektor lainnya. (Badan Pusat Statistik,2015:637) (Lampiran 1).

Salah satu tanaman pangan yang sangat penting dan strategis kedudukannya sebagai sumber penyediaan kebutuhan pokok yaitu beras. Beras berkaitan erat dengan kebutuhan rakyat banyak dan dapat dijadikan sebagai alat politik. Jumlah penduduk yang semakin meningkat menyebabkan kebutuhan akan beras pun semakin meningkat. Namun, produksi padi cenderung stagnan bahkan menurun dan kondisi kesejahteraan petani itu sendiri juga terus mengalami penurunan (Mariyah dalam Pane,2014:1)

Menurunnya tingkat kesejahteraan petani dapat disebabkan oleh variabel-variabel yang mempengaruhi petani dalam menerapkan usaha-usaha peningkatan hasil pertanian, misalnya status penguasaan tanah, pola pertanaman, luas penguasaan tanah, tata krama petani dan faktor lingkungan sosial ekonomi. Menurut Parhusip (1983) dalam Hasnah (1993:3) jaminan produksi dan pendapatan petani ditentukan oleh luasnya pemilikan dan penguasaan tanah. Makin luas tanah yang dimiliki memungkinkan memperoleh produksi dan pendapatan yang tinggi pula.

Dalam tatanan pertanian pedesaan, secara garis besar sistem penguasaan lahan dapat diklasifikasikan statusnya menjadi hak milik, sewa, sakap (bagi hasil), dan gadai. Status hak milik adalah lahan yang dikuasai dan dimiliki oleh perorangan atau kelompok atau lembaga/organisasi. Status sewa, sakap (bagi hasil), dan gadai bisa dikatakan bentuk-bentuk penguasaan lahan dimana terjadi pengalihan hak garap dari pemilik lahan kepada orang lain (Pakpahan dalam Irmayanti,2010:2)

Masalah yang timbul akhir-akhir ini di kalangan petani yaitu semakin sempitnya luas lahan dan kepemilikan tanah garapan yang diakibatkan oleh peningkatan pertumbuhan penduduk. Menurut Gunawan Wiradi (1984:250) ada beberapa alasan mengapa persoalan pemilikan tanah dan penguasaan tanah di daerah pedesaan dianggap layak untuk diperhatikan : (1) Telah diketahui secara umum bahwa jumlah penduduk berkembang dengan cepat. Disegi lain areal tanah pertanian nyaris tidak bertambah ataupun pertambahan itu jauh lebih sedikit daripada pertambahan penduduk. Hal ini menimbulkan banyak akibat, salah satu diantaranya adalah makin kecilnya pemilikan tanah dan proses penyempitan pemilikan itu pun berlanjut. Terjadilah kemudian suatu cara yang dipergunakan oleh masyarakat pedesaan untuk bereaksi terhadap gejala tersebut, disebut dengan *shared property*. (2) Pengaruh perekonomian uang yang mulai merembes ke daerah pedesaan disusuli oleh berbagai akibat dalam hal hubungan sosial. Disamping itu, lewat proses jual-beli dan sewa menyewa tanah terjadilah pula di satu pihak proses pemusatan pemilikan dan penguasaan tanah ditangan beberapa orang, sedang dipihak lain makin banyak orang yang tidak memiliki dan menguasai tanah lagi. (3) Masalah pemilikan tanah dan penguasaan tanah

didaerah pedesaan ternyata menjadi salah satu sumber ketegangan sosial dan politik di daerah pedesaan.

Status penguasaan lahan yang ada membuat adanya berbagai kemungkinan-kemungkinan dalam proses pengelolaan lahan. Pemilik lahan sendiri akan bebas menentukan langkah-langkah yang akan dilakukan untuk lahan yang dikelolanya, sementara pemilik lahan sewa, gadai dan bagi hasil mempunyai peraturan-peraturan yang disepakati dengan pemilik lahan. Pengelolaan usahatani adalah kemampuan petani bertindak sebagai pengelola atau manajer dari usahanya. Dalam hal ini petani harus pandai mengorganisasikan penggunaan faktor-faktor produksi. Karena produktivitas masing-masing faktor produksi dan produktivitas usahatani merupakan tolak ukur keberhasilan pengelolaan. Oleh sebab itu, pengelolaan atau manajemen menjadi sangat penting karena akan menentukan tingkat keberhasilan petani dalam mengelola usahatani serta mendapatkan hasil produksi yang tinggi (Daniel 2002:95).

Kecamatan Sungai Tarab merupakan salah satu daerah penghasil produksi padi kedua terbesar di Kabupaten Tanah Datar setelah Kecamatan Pariangan (Lampiran 2). Salah satu Nagari yang ada di Kecamatan Sungai Tarab adalah Nagari Gurun. Perbedaan pengelolaan lahan berdasarkan status penguasaan lahan dapat ditemukan di Nagari Gurun Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar, Perbedaan penguasaan lahan yang ada di Nagari Gurun ini diantaranya disebabkan oleh pemilik sawah yang tidak bisa menggarap sawahnya dikarenakan faktor usia dan memiliki pekerjaan selain bertani, golongan tuan tanah yang mempunyai lahan sawah yang luas tapi tidak menetap di Nagari Gurun hal ini menyebabkan tanah-tanah yang dikuasai oleh golongan pemilik yang luas disewakan atau dibagihasilkan kepada penggarap-penggarap yang tidak memiliki lahan atau memiliki lahan sempit, dengan demikian dari segi ekonomi pertanian ,pola usahatani kecil-kecilan tetap bertahan di wilayah pedesaan .

Menurut Suratiah 2008:41, jumlah produksi dan keberhasilan suatu usahatani tergantung pada siapa pengelolanya. Seorang dengan kreativitas tinggi akan lebih mampu mengelola usahatani dengan baik. Dengan kata lain, manajemen sebagai sumberdaya sangat dipengaruhi oleh "*human capital*" pengelola usahatani tersebut yang pada akhirnya akan menentukan keberhasilan

suatu usahatani. Peran petani sebagai manajer pada usahatannya tentu akan memengaruhi pengelolaan usahatani dengan status penguasaan lahan yang berbeda, oleh sebab itu perbandingan pengelolaan usahatani berdasarkan status penguasaan lahan yang ada seperti pemilik penggarap, bagi hasil, sewa dan gadai penting untuk dilakukan agar bisa melihat tingkat keberhasilan petani dalam mengelola usahatani dengan perbedaan status yang ada.

B. Rumusan Masalah

Akibat dari penambahan jumlah penduduk dan pemilikan tanah yang tidak merata, hal ini menyebabkan banyaknya petani yang memiliki tanah garapan yang sempit. Kecilnya luas lahan yang digarap per individu yang aktif dalam pertanian, mengakibatkan pendapatan perkapita disektor pertanian jauh lebih rendah dari sektor-sektor ekonomi lainnya, padahal penduduk yang bekerja di sektor pertanian jauh lebih besar daripada penduduk yang bekerja di sektor-sektor ekonomi lainnya. Untuk mengimbangi kesempitan lahan, petani akan berusaha menambah luas tanah garapannya baik dengan sewa maupun dengan bagi hasil.

Perbedaan status penguasaan lahan terutama dalam mengelola usahatani, lazim terjadi pada usaha tani padi sawah. Seperti halnya petani di kenagarian Gurun yang memiliki luas lahan pertanian sawah lebih luas daripada luas pemukimannya sendiri. Luas lahan pertanian sawah yang ada di kenagarian Gurun adalah seluas 444 Ha (lampiran 4). Mayoritas mata pencaharian masyarakat di Nagari Gurun adalah sebagai petani baik itu petani yang mengusahakan padi sawah ataupun petani yang mengusahakan cabang usaha tani lainnya. Dari jumlah penduduk usia 15 tahun keatas yang bekerja dibidang pertanian sekitar 76% dari total penduduk usia produktif bekerja di sektor pertanian (Lampiran 5).

Rata-rata petani yang ada di Nagari Gurun mengusahakan tanaman padi sawah, dengan status penguasaan lahan yang berbeda yakni petani yang mengolah atau menggarap lahan sendiri (petani pemilik penggarap), petani yang menggarap lahan orang lain dengan sistem bagi hasil (petani penyakap), petani yang menyewa lahan orang lain dan petani yang tinggal di desa lain tetapi memiliki dan menggarap lahan didaerah penelitian serta petani yang mengelola usaha tani karena adanya peralihan hak atas tanah kepada orang lain atau biasa disebut

dengan gadai. Di Kenagarian Gurun terdapat 9 kelompok tani yang masih aktif dan 1 gapoktan yang dengan jumlah anggota dari keseluruhan kelompok tani adalah 230 petani yang mengelola usaha tani padi . Dari 230 orang jumlah petani yang ada didaerah ini, sekitar 52% adalah petani dengan status bagi hasil atau sakahap dan yang lain merupakan petani pemilik penggarap, sewa ataupun gadai yang diantaranya 28 % untuk petani pemilik penggarap, 11% sewa dan 9% nya untuk petani dengan status gadai di Nagari Gurun Kecamatan Sungai Tarab (Lampiran 6).

Perbedaan penguasaan lahan ini berhubungan erat dengan penggunaan masukan dan keuntungan yang diperoleh. Pada kasus-kasus tertentu dimana pemilikan lahan mempunyai pengaruh terhadap proses produksi, sering dijumpai bahwa proporsi biaya yang dipikul oleh masing-masing pembuat keputusan (pemilik lahan) tidak proporsional dengan keuntungan yang dibagi. Keputusan yang diberikan tentu saja tidak akan sama di antara status penguasaan lahan yang berbeda tersebut, sekalipun besarnya biaya dan keuntungan yang diterima adalah proporsional.

Berdasarkan uraian tersebut permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengelolaan usaha tani padi sawah berdasarkan perbedaan status penguasaan lahan di Kenagarian Gurun, Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar.
2. Bagaimana produktivitas dan pendapatan usahatani padi sawah berdasarkan status penguasaan lahan di Kenagarian Gurun, Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar.

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang di angkatkan diatas, maka penulis merasa perlu melakukan penelitian yang berjudul ” ***Analisis Pengelolaan Usaha Tani Padi Sawah Berdasarkan Status penguasaan Lahan di Nagari Gurun Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar***”

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka dapat dirumuskan tujuan penelitian sebagai berikut.

1. Menganalisis pengelolaan usahatani padi sawah berdasarkan status penguasaan lahan di Kenagarian Gurun, Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar.
2. Mendeskripsikan produktivitas dan pendapatan usahatani padi sawah berdasarkan status penguasaan lahan di Kenagarian Gurun, Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang pengaruh status penguasaan lahan terhadap usahatani padi sawah , sehingga bisa dijadikan sebagai sumber informasi bagi pemerintah dalam perumusan kebijakan terhadap usaha peningkatan produksi padi.
2. Bagi petani , hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi mengenai dampak dan manfaat dari perbedaan status penguasaan lahan yang terjadi di Nagari Gurun, Kecamatan Sunagai Tarab Kabupaten Tanah Datar.
3. Bagi Penulis, hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk menjadi media dalam menerapkan disiplin ilmu yang didapatkan penulis di dunia akademik.
4. Bagi Pembaca ,hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan rujukan dalam penelitian selanjutnya.